

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan ekonomi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh investasi modal manusia, partisipasi kerja perempuan, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 12 Provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2015-2024, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan terbukti berpengaruh positif kuat dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini menegaskan secara empiris teori *Human Capital* bahwa perluasan jaminan akses dan penuntasan wajib belajar bagi anak perempuan merupakan instrumen paling efektif dan mutlak dalam memotong jurang ketimpangan kualitas hidup berbasis gender di tingkat regional.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan memiliki koefisien bertanda positif namun tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kuantitas atau jumlah perempuan yang memasuki pasar kerja tidak otomatis mengungkit kesetaraan gender, disebabkan oleh masih dominannya penyerapan tenaga kerja wanita pada sektor informal berproduktivitas rendah, sektor pertanian tradisional, serta rendahnya tingkat pengupahan.
3. Kemiskinan memiliki koefisien bertanda negatif namun tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kawasan Timur Indonesia. Fluktuasi kemiskinan tidak secara langsung memengaruhi nilai IPG, karena berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan bisa lebih dijangkau.
4. Efek Interaksi (HLS Perempuan x TPAK Perempuan) membuktikan bahwa HLS Perempuan bertindak sebagai variabel yang memperkuat. Efek

marginal (*marginal effects*) menunjukkan bahwa interaksi positif antara pendidikan dan partisipasi kerja mampu mengubah pengaruh TPAK perempuan yang semula tidak signifikan menjadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPG. Kualitas modal manusia yang tinggi (HLS) menjadi prasyarat mutlak agar keterlibatan perempuan di pasar kerja (TPAK) dapat memberikan dampak optimal terhadap penguatan standar hidup layak dan kesetaraan gender.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) sebagai variabel kontrol ekonomi makro terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kawasan Timur Indonesia. Perluasan skala ekonomi daerah berhasil memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran publik yang inklusif yang mempercepat pemerataan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan dari hasil temuan empiris di atas, maka saran-saran kebijakan yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, pemerintah daerah harus mengesampingkan kebijakan pembangunan yang bersifat bias fisik semata dan menggeser fokus pada jaminan pendidikan formal bagi perempuan. Diperlukan penuntasan program wajib belajar 12 tahun yang inklusif, pemberian beasiswa khusus anak perempuan di daerah pedalaman atau tertinggal, serta perbaikan fasilitas sanitasi sekolah yang ramah gender guna menekan angka putus sekolah pada remaja putri.
2. Pemerintah tidak bisa hanya mendorong kuantitas perempuan untuk bekerja, melainkan wajib menciptakan integrasi kebijakan. Dikarenakan TPAK baru akan bermakna signifikan saat didorong oleh HLS yang tinggi, dinas ketenagakerjaan setempat perlu memfasilitasi program pelatihan vokasional, sertifikasi keahlian, dan penguatan literasi digital bagi angkatan kerja perempuan agar mereka mampu bertransisi dari sektor informal berupah rendah menuju sektor formal yang menawarkan pengupahan setara.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti mendatang dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel

sosial budaya atau kelembagaan yang belum tercakup dalam model ini, seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tingkat upah minimum regional perempuan, atau alokasi anggaran belanja urusan pemberdayaan perempuan dalam APBD. Selain itu, penggunaan metode analisis kualitatif pendukung (*mixed-methods*) atau pemodelan spasial panel sangat disarankan guna menangkap karakteristik keunikan adat istiadat setempat yang secara tidak langsung membentuk struktur ketimpangan gender di Kawasan Timur Indonesia.